

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergantian kepemimpinan yang terjadi dalam sistem demokrasi dilakukan dengan melakukan pemilihan terhadap calon pemimpin. Pemilihan tersebut sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dengan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih calon pemimpin mereka. Sebagai upaya mewujudkan demokrasi pada tingkat lokal, yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat pertama kali dibuatlah Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bagian kedelapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menjadi dasar dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2013. Pelaksanaan pilkada tersebut dilaksanakan secara terpisah waktunya di setiap daerah karena mekanisme waktu dari pelaksanaan pilkada masih belum ditentukan.

Tahun 2015, dibuat UU No. 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Dalam pelaksanaan dari UU No. 8 tahun 2015 mengalami permasalahan, yaitu dalam pilkada serentak harus terdapat setidaknya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan di beberapa daerah masih terdapat calon tunggal saja. Hal ini mengakibatkan ditundanya pilkada di beberapa daerah di Indonesia dengan harapan akan muncul calon lain yang menjadi lawan dalam pilkada. Karena Undang-undang tidak dapat menunda

pelaksanaan pilkada dengan tanpa batasan waktu, maka diperbarui dengan UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang memperbolehkan pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon saja, namun melawan kotak kosong. Artinya rakyat di daerah tersebut mempunyai hak untuk menentukan setuju atau tidak calon tunggal tersebut menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah mereka.

Latar belakang munculnya calon tunggal dalam pilkada disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya yaitu munculnya sosok figur yang sangat dicintai oleh masyarakatnya sehingga semua partai mengukung calon yang sama, figur tersebut memiliki elektabilitas yang tinggi, akibatnya tidak ada calon lain yang berani menjadi penantang sosok tersebut dalam pilkada sehingga menyebabkan terjadinya calon tunggal. Hal ini sama dengan kasus yang terjadi di kota Surabaya dimana sosok Tri Rismaharini sebagai seorang walikota Surabaya yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Tinggalelektabilitas yang tinggi dari Tri Rismaharini menyebabkan tidak ada yang berani menjadi lawan dalam pilkada serentak tahun 2015 hingga dilakukan masa perpanjangan pendaftaran bagi calon yang lain walaupun akhirnya muncul calon yang menjadi lawan bagi Tri Rismaharini.

Sebab lain dari munculnya calon tunggal ialah mahalnyabiaya yang diminta oleh partai pengukung. Apabila ada seorang calon petahana yang kuat ditambah lagi dengan biaya pencalonan sangat mahal yang diminta oleh partai pengukung, maka sebelum mencalonkan diri menjadi lawan dalam pilkada, calon penantang tersebut akan berpikir secara rasional mengenai persentase kemungkinan menang dalam pilkada. Banyak calon pesaing yang memilih mundur disebabkan oleh faktor ini sehingga mengurungkan untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Belum lagi biaya yang dibutuhkan untuk kampanye dan untuk meraih suara pemilih atau dalam istilah lain disebut dengan marketing politik untuk mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat sehingga masyarakat mau untuk memilih mereka.

SKRIPSI

Achmad Ronggo Prihatmono

Faktor lainnya yang menjadi penyebab dari lahirnya calon tunggal yaitu, kriteria dan persyaratan dalam undang-undang mengenai syarat dukungan yang diharuskan apabila parpol hendak mengusung calon kepala daerah dalam pilkada. Dari jalur parpol berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (1) yaitu: partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Hal ini membuat parpol mengalami kesulitan untuk mengusung pasangan calon apabila, mereka tidak mempunyai jumlah kursi sesuai dengan batas yang ditentukan atau tidak mendapatkan dukungan dari partai lain untuk berkoalisi, agar memenuhi persyaratan jumlah kursi minimal yang ditentukan untuk mengusung calon dalam pilkada.

Pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan secara langsung, sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 pertama kali telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2005. Pelaksanaan pilkada langsung diselenggarakan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pemilihan kepala daerah secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang ada dalam prinsip sebuah negara demokrasi. Melalui diselenggarakannya pilkada langsung berarti demokrasi pada tingkat lokal telah berhasil mencapai tujuan-tujuan dasarnya, yaitu memilih pimpinan daerah melalui sebuah mekanisme pemilihan yang demokratis yang bebas, adil dan dengan tanpa kekerasan. Selain itu kepala daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara langsung, memiliki legitimasi yang kuat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suara secara langsung.

Berikut ini merupakan data pilkada calon tunggal yang ada di Indonesia dimulai dari masa sebelum pilkada serentak yaitu pada tahun 2005-2013:

Tabel 1 pilkada calon tunggal di Indonesia tahun 2005-2013.¹

Kabupaten	Nama Calon
Deli Serdang	Amri Tambunan-Yusuf Sembiring
Padang Lawas Utara	Bachrum Harahap-Riskon Hasibuan
Pasuruan	H. Dade Angga, S.IP-Drs. H. Eddy Paripurna
Lebak	H. Mulyadi Jayabaya SE- Ir. Amir Hamzah M.Si
Tangerang	Ismet Iskandar-Rano Karno
Tapin	Drs. H. Idris Nurdin Halidi, M.A.P-Drs. Achmad Fauzi, M.A.P
Minahasa Tenggara	Telly Tjanggalung-Drs. Jeremia Damongilala
Bone	H. Andi M. Idris Galigo- H. A.M. Said Pabokori
Enrekang	Ir. H. La Tinro La Tunrung-Drs. H. Nur Hasan
Mamasa	Obed Nego Depparinding- Ramlan Badawi
Memberamo Tengah	Ricky Ham Pagawak- Yonas Kenelak
Puncak	Willem Wandik S.E, M.Si- Refinus Telenggen
Jayawijaya	John Wempi Wetipo SH., M.H.-John Richard Bana
Kota Prabumulih	Rachman Djalili-Yuri Gagarin
Kota Tangerang	Drs. H. Wahidin Halim M.Si-Deddy Syafei
Kota Makassar	Dr. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M.-Andi Herry Iskandar

¹ Diolah dari berbagai sumber.

Lombok Timur	H. M. Sukiman Azmy, M.M.-H. M. Syamsul Luthfi
--------------	---

Pada masa sebelum pilkada serentak tahun 2005-2013, terdapat tujuh belas daerah yang terjadi fenomena calon tunggal. Pada pilkada ini menggunakan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, telah berhasil menyelenggarakan pilkada yang dilakukan oleh rakyat di masing-masing daerah. Permasalahan yang timbul adalah belum diaturnya undang-undang yang membahas pilkada dengan hanya diikuti satu pasangan calon. Fenomena calon tunggal di beberapa daerah, disebabkan oleh munculnya figur yang memiliki elektabilitas yang tinggi dan kekuatan modal, sehingga sulit dikalahkan dan dilanjutkan oleh kerabatnya. Hal ini seperti yang terjadi pada daerah Deli Serdang yaitu, pasangan calon tunggal Amri Tambunan-Yusuf Sembiring, kemudian dilanjutkan oleh putranya pada tahun 2014 juga menjadi pasangan calon tunggal Ashari Tambunan-Zainudin Mars. Hal serupa juga terjadi di Padang Lawas Utara, dimana pasangan calon tunggal Bachrum Harahap-Riskon Hasibuan terpilih selama dua periode, kemudian dilanjutkan oleh pasangan putranya yang juga menjadi calon tunggal yaitu Andar Amin Harahap-Hariro Harahap.

Berikut ini data pilkada calon tunggal di Indonesia pada masa pilkada serentak yaitu mulai tahun 2015-2018:

Tabel 2 data pilkada calon tunggal di Indonesia tahun 2015-2018.²

Kabupaten	Nama pasangan calon tunggal	Partai Politik Pengusung
Kabupaten Tasikmalaya	UU Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto	PDIP, PAN, PKS
Kabupaten Blitar	Rijanto-Marhaenis	PDIP, Gerindra

²<https://www.infopemilu.kpu.go.id/> diakses pada 10/03/2019 pukul 20.07

	Urip Widodo	
Kota Makassar	Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi	Nasdem, Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, PBB, PKS, PKPI
Kabupaten Timor Tengah Utara	Roymundus Sau Fernandes-Aloysius Kobes	PDIP
Kabupaten Pati	Haryanto-Saiful Arifin	PDIP, PKB, Gerindra, Demokrat, Hanura, Golkar, PKS, PPP
Kabupaten Bone	Fahsar Muhdin Padjalangi-Ambo Dalle	PBB, PPP
Kota Prabumulih	Ridho Yahya- Andriansyah Fikri	Nasdem, PAN, Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, PKPI, PBB, Golkar, PDIP
Kabupaten Lebak	Iti Oktavia Jayabaya- Ade Sumarbi	Demokrat, PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra, PKS, PKB, PPP, Hanura, PAN
Kota Tangerang	Arief R Wismansyah- Sachrudin	Semua Partai yang mempunyai kursi di DPRD
Kabupaten Pasuruan	Muhammad Irsyad Yusuf-A Mujib Imron	PKB, Nasdem, Golkar, Gerindra, PPP, PKS, Hanura, PDIP
Kabupaten Enrekang	Muslimin Bando- Asman	Hanura, PDIP, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar
Kabupaten Minahasa Tenggara	James Sumendap- Jesaja Jocke Oscar Yogi	PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, Gerindra, Hanura, PKPI, PPP
Kabupaten Tapin	Muhammad Arifin Arpan-Syafrudin Noor	Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, PKS, PPP
Kabupaten Puncak	Willem Wandik- Pelinus Balinal	PDIP, PKS, Hanura, PKB, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKPI, Golkar
Kabupaten Mamasa	Ramlan Badawi- Marthinus Tirinda	Demokrat, PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PKPI, PPP, PAN, PBB
Kabupaten Jayawijaya	Jhon Richard Banua- Martin Yagobi	PDIP, Demokrat, Gerindra, PKB, Hanura, PAN, PKS, Nasdem, PKPI, PBB
Kabupaten Padang Lawas Utara	Andar Amin Harahap-Hariro Harahap	Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKB, PDIP, Hanura, PAN, PPP, PBB, PKPI

SKRIPSI

Achmad Ronggo Prihatmono

PILKADA CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017: SUATU TINJAUAN

OLIGARKISME PARPOL

Kabupaten Deli Serdang	Ashari Tambunan-M Ali Yusuf Siregar	Golkar, PDIP, PAN, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Hanura, PPP, PKB, PKPI
Kabupaten Tangerang	Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli	Semua partai yang mempunyai kursi di DPRD
Kabupaten Memberamo Tengah	Ricky Ham Pengawak-Yonas Kenelak	PDIP, PKS, PBB, Demokrat, Gerindra, PAN
Kota Tebing Tinggi	Umar Zunaidi Hasibuan-Oki Doni Siregar	Gerindra, PPP, Golkar, PDIP, Hanura, Nasdem, PKPI, PKB, Demokrat
Kabupaten Tulang Bawang	Umar Ahmad-Fauzi Hasan	PDIP, PKS, Demokrat, PPP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, Nasdem
Kabupaten Buton	Samsul Umar Abdul Samiun-La Bakry	PDIP, Nasdem, PKS, PPP, PKB
Kabupaten Maluku Tengah	Tuasikal Abua- Marlatu Leleury	PKS, Gerindra, Partai Merdeka, PKB, Golkar
Kota Jayapura	Benhur Tommy Mano-Rustan Saru	PKB, Hanura, PAN, Nasdem, Golkar, PDIP, Gerindra,
Kota Sorong	Lambert Jitmau- Pahima Iskandar	Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, Nasdem, Gerindra, Hanura, PKB

Fenomena calon tunggal yang terjadi dalam pilkada yang berlangsung di beberapa daerah di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor. Faktor pertama yaitu, partai politik yang tidak menjalankan fungsi rekrutmen atau mencalonkan seorang calon yang diambil dari kader partai politik tersebut, untuk di usung menjadi lawan dalam pilkada sehingga tidak terjadi hanya ada satu calon yang terdaftar dalam pilkada. Faktor kedua, sebenarnya sudah ada yang mencalonkan sebagai lawan dalam pilkada namun, sebelum waktu pemilihan, calon tersebut mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam proses pencalonan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sebagai contoh, banyaknya calon yang mundur di tengah jalan karena elektabilitas seorang calon di suatu daerah terlalu tinggi. Sehingga sulit untuk dikalahkan oleh calon lain. Selain faktor terlalu tingginya elektabilitas salah satu calon yang ada, juga bisa

7

disebabkan karena besarnya dana yang dibutuhkan untuk mengikuti pilkada. Hal ini menyebabkan hanya calon yang mempunyai dukungan dana yang kuat dan elektabilitas yang tinggi saja yang berani untuk bersaing dalam pilkada. Kalau hanya sekedar ingin mencoba menjadi penantang dalam pilkada tanpa dukungan elektabilitas yang tinggi, banyak calon yang lebih memilih untuk mundur karena mereka akan mengalami kerugian materi yang besar karena mengikuti pilkada membutuhkan dana yang besar. Faktor yang ketiga yaitu pragmatisme partai politik, partai politik membentuk koalisi lintas partai yang bersifat pragmatis. Partai politik mengesampingkan ideologi partai untuk mengejar uang dan kekuasaan dalam membentuk koalisi. Partai-partai politik mengedepankan pertimbangan rasional dan jangka pendek untuk tetap berada dalam kekuasaan dengan memenangkan pilkada walaupun harus mengesampingkan ideologi partai.

Proses terjadinya fenomena calon tunggal dapat dibagi menjadi dua pola. Pertama, selama masa pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya ada satu pasangan calon saja yang mendaftar di KPUD sampai berakhirnya proses seleksi dan pengumuman. Kedua, sebenarnya sudah ada lebih dari satu calon yang mendaftar sebagai calon kepala daerah di KPUD namun yang lolos dalam proses seleksi dan berhak untuk mengikuti proses pilkada hanya satu pasangan calon saja. Pada kasus pola yang pertama yaitu, calon pasangan tersebut kebanyakan merupakan petahana yang memiliki elektabilitas yang tinggi sehingga, akan mendominasi dalam pilkada yang menyebabkan mundurnya calon-calon potensial untuk mendaftarkan diri dalam pilkada. Sedangkan untuk pola yang kedua terjadi karena pasangan calon yang lain mengundurkan diri pada saat berlangsungnya proses seleksi atau mereka tidak melengkapi syarat-syarat sebagai calon dalam pilkada sehingga gugur dalam proses seleksi.

Fenomena yang menarik dari diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung adalah munculnya kapitalisasi dalam proses pemilihan kepala

SKRIPSI

Achmad Ronggo Prihatmono

**PILKADA CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017: SUATU TINJAUAN
OLIGARKISME PARPOL**

daerah berupa money politics dan politik transaksional.³ Munculnya kapitalisasi dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab dari mahalnya biaya yang dibutuhkan oleh calon kepala daerah, dari model pemilihan yang sebelumnya dipilih oleh DPRD atas persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini dapat menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh para elit politik yang tidak hanya berkompetisi untuk mengejar kekuasaan semata namun, sekaligus juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari pesta demokrasi lokal pemilihan kepala daerah.

Pembahasan saya disini adalah mengenai fenomena calon tunggal yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Fenomena yang terjadi pada pilkada langsung Kabupaten Pati tahun 2017 hanya ada calon tunggal yang juga merupakan petahana, yaitu pasangan calon Haryanto dan Saiful Arifin yang maju mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati dan tidak ada yang menjadi lawan dari pasangan calon tersebut sehingga, pasangan calon tersebut melawan kotak kosong pada saat pilkada berlangsung. Sebelumnya belum ada fenomena calon tunggal pada Pilkada yang dilangsungkan di Kabupaten Pati, baru pada pilkada pada tahun 2017 pertama kali terjadi fenomena calon tunggal pada pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Pati.

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017, menunjukkan bahwa dalam pilkada tersebut masih belum dapat untuk dikatakan sebagai pilkada yang aspiratif dan demokratis, karena pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 masih belum kompetitif, artinya dalam pilkada tersebut Haryanto sebagai petahana tidak mempunyai lawan yang menjadi kompetitornya dalam Pilkada Pati 2017, dan akhirnya menjadi satu-satunya calon yang mencalonkan diri sebagai calon bupati Kabupaten Pati. Dari adanya fenomena calon tunggal ini mempunyai implikasi terhadap demokrasi yang ada di

³Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 59.

Indonesia, karena yang diharapkan dengan adanya demokrasi akan ada sirkulasi elit, sedangkan dalam demokrasi yang masih dikuasai oleh oligarki menyebabkan sirkulasi elit yang ada tidak berjalan dengan baik. Dapat dikatakan terjadi sirkulasi dalam elit, namun yang menjadi permasalahan adalah perputaran elit yang ada hanya berotasi dalam lingkup lingkaran oligarki elit tersebut. Melalui cara ini, oligarki mempertahankan dominasi politik dengan menutup jalan bagi pesaing politik yang dapat melengserkan mereka dari kekuasaan politik. Kalangan oligark lebih banyak memanfaatkan sumberdaya material untuk melancarkan usaha politik mereka. Dengan memanfaatkan situasi ketimpangan materi yang ada dalam lingkungan masyarakat, menjadi cara untuk memenangkan kontestasi politik. Apalagi jika kekuasaan material yang dimiliki oleh kaum oligark juga didukung oleh mahalnya biaya politik dan tradisi budaya money politics yang ada di masyarakat, semakin mudah untuk menggeser pesaing politik yang kurang memiliki sumber daya materi yang kuat.

Fenomena calon tunggal di Kabupaten Pati menarik untuk diteliti karena, calon tunggal diusung oleh tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati terdapat 17 partai politik yaitu: PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, Golkar, PKS, Hanura, Nasdem, PPP, PAN, PBB, PKPI, Partai Berkarya, Partai Idaman, PSI, Perindo, dan Partai Garuda.⁴ DPRD Kabupaten Pati terdapat 50 orang wakil rakyat, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pati diantaranya yaitu: PDIP 8 kursi, Gerindra 9 kursi, PKB 7 kursi, Demokrat 8 kursi, Nasdem 4 kursi, PKS 5 kursi, Golkar 5 kursi, Hanura 4 kursi.⁵ Pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful diusung oleh 8 partai politik yaitu: PDIP, PKB, Gerindra, Demokrat, Hanura, Golkar, PKS, PPP. Partai politik yang memiliki kursi di DPRD namun tidak mendukung calon tunggal yaitu hanya partai Nasdem saja, sedangkan partai PPP tidak mendapatkan kursi di

⁴<https://kesbangpol.jatengprov.go.id> diakses pada tanggal 29/03/2019 pukul 08.40

⁵<https://dprd.patikab.go.id/page/profil-anggota-dprd-periode-2014-2019/25> diakses pada tanggal 29/03/2019 pukul 09.22

DPRD namun ikut dalam koalisi partai politik yang mengusung pasangan calon Haryanto-Saiful.

Sebelum berlangsungnya pilkada Pati, banyak laporan mengenai maraknya dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon tunggal dan menyebabkan panasnya situasi yang terjadi antara pendukung dari Haryanto dengan relawan yang mendukung kotak kosong. Bahkan ada gerakan masyarakat yang tidak menginginkan Haryanto untuk memimpin kembali Kabupaten Pati. Gerakan masyarakat ini tidak hanya melaporkan adanya kecurangan money politics yang dilakukan oleh pasangan calon tunggal kepada Panwaslu saja melainkan juga mengajukan gugatan terkait kecurangan pada pilkada Pati kepada Mahkamah Konstitusi.⁶

Selain karena calon tunggal diusung oleh tujuh partai politik, fenomena calon tunggal di Kabupaten Pati juga menarik untuk diteliti karena rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Hasil rekapitulasi pilkada Pati pasangan calon Haryanto-Saiful mendapatkan 519.675 suara, dari total 697.437 suara sah. Sementara kotak kosong mendapatkan suara sebanyak 177.762 suara. Namun, jika dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap Pati yang mencapai 1.034.256, tingkat partisipasi pemilih yang ada hanya 68,9%.⁷

Dari banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat yang menginginkan sosok pemimpin yang baru, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pati seperti ini, sebetulnya sudah mencerminkan adanya demokrasi dalam pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Pati namun, kebenaran dari hal ini masih menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi penelitian

⁶<https://jateng.tribunnews.com/2017/03/16/mengejutkan-ini-alasan-relawan-kotak-kosong-ajukan-gugatan-ke-mk-terkait-hasil-pilkada-pati-2017> diakses pada tanggal 26-11-2019 pukul 20.44

⁷<https://jateng.tribunnews.com/2017/02/23/ini-hasil-rekapitulasi-suara-pilkada-pati-kotak-kosong-dipilih-lebih-dari-170-ribu-warga> diakses pada 26/01/2019

saya. Apakah benar masyarakat melakukan itu semua karena kehendak dari masyarakat, untuk melawan kecurangan yang ada, ataukah hanya merupakan settingan yang memang disusun dengan rapi oleh pihak tim sukses dari Haryanto, untuk menciptakan kondisi seolah-olah dalam Pilkada Pati demokrasi memang benar-benar hidup. Meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja tanpa adanya lawan yang menjadi penantang daripada Haryanto, selaku petahana dan didukung oleh hampir semua partai politik besar yang ada di Kabupaten Pati.

Meskipun demikian, tidak seharusnya hanya ada calon tunggal saja yang maju dalam pilkada. Dalam demokrasi yang hidup, seharusnya partai-partai politik lain mempunyai kader dari partai politik masing-masing, yang dapat diusung sebagai calon kepala daerah dari partai politik mereka. Namun situasi yang terjadi malah sebaliknya, tidak ada partai politik yang mencalonkan kader dari partai untuk menjadi penantang dari calon tunggal, bahkan partai-partai tersebut berkoalisi untuk memenangkan sang petahana. Jika dihitung-hitung dengan bergabungnya banyak partai besar dalam koalisi untuk memenangkan calon tunggal, secara otomatis seharusnya dapat dengan mudah untuk mengalahkan kotak kosong, sebab secara kuantitas semakin banyaknya partai politik yang mendukung maka semakin besar pula suara yang dapat diperoleh oleh calon tersebut. Hal ini justru mematikan demokrasi lokal yang ada sehingga, demokrasi lokal yang ada tidak mengenal adanya kompetisi yang sengit dalam demokrasi yang bertujuan untuk memilih calon pemimpin terpilih yang memang dicintai oleh masyarakatnya.

Teori yang tepat untuk membahas mengenai fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Pati, yaitu menggunakan teori hukum besi oligarki yang dicetuskan oleh Robert Michels. Selain menggunakan teori hukum besi oligarki, untuk membahas mengenai fenomena calon tunggal di Kabupaten Pati, juga memerlukan tambahan dari adanya loby-loby politik dan politik transaksional yang dilakukan oleh elit politik untuk memenangkan pasangan calon tunggal. Hal ini dapat dilihat dari tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten

SKRIPSI

Achmad Ronggo Prihatmono

Pati yaitu PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, Golkar, dan Hanura semuanya membentuk koalisi mengusung pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful.

Teori hukum besi oligarki dapat digunakan untuk melihat bagaimana keputusan dari DPP suatu partai politik memengaruhi terhadap calon yang akan diusung oleh partai politik tersebut, meskipun partai politik masih memiliki kader lain yang berkualitas. Hal ini seperti yang dialami oleh Budiono, mantan wakil bupati Kabupaten Pati yang telah mendaftarkan diri ke PDIP sebagai calon Bupati dalam pilkada Pati tahun 2017. Budiono ingin menggabungkan kekuatan PDIP dengan PKB karena Budiono merupakan seorang tokoh NU. Keinginan Budiono tidak terpenuhi karena DPP PDIP memutuskan untuk mengusung pasangan Haryanto-Saiful sebagai calon yang diusung oleh PDIP. Demikian juga yang terjadi pada PKB, PKB juga masuk kedalam koalisi partai politik yang mengusung pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful. Partai politik tidak hanya mencari kader yang berkualitas saja, partai politik juga mempertimbangkan popularitas dan kekuatan modal yang dimiliki oleh seorang calon, sebelum diusung oleh partai politik tersebut.

Selain menggunakan teori hukum besi oligarki, untuk mengamati fenomena calon tunggal memerlukan tambahan dari sudut pandang loby politik dan politik transaksional. Seperti yang terjadi pada fenomena calon tunggal pilkada Pati 2017, tujuh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD mengusung pasangan Haryanto-Saiful. Dibalik terbentuknya koalisi partai politik tersebut, tentunya ada loby politik dan politik transaksional yang dilakukan oleh elit dari partai politik untuk memenangkan pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful.

Fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 menggunakan hukum besi oligarkhi karena, keputusan terhadap siapa calon yang akan diusung oleh partai politik ditentukan oleh keputusan surat rekomendasi dari

DPP Partai. Hal ini sesuai dengan asumsi dari teori hukum besi oligarkhi dari Robert Michels yang menyebutkan bahwa organisasi sedemokratis apapun pasti akan terdapat oligarkhi, termasuk dalam organisasi yang besar seperti partai politik. Oligarkhi muncul karena dalam sebuah organisasi memerlukan adanya kepemimpinan. Kepemimpinan dipegang oleh sekelompok orang timbul menjadi oligarkhi, karena adanya upaya untuk mempertahankan kekuasaan atau tetap berada di lingkaran kekuasaan. Dalam kasus fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2017, berkaitan dengan kekuasaan oligarki yang dipegang oleh DPP Partai. Tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati, bersama membentuk koalisi memenangkan pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful.

Oligarkhi yang ada dalam DPP partai politik sulit untuk diganggu-gugat. Seperti yang pernah terjadi pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2012. Pilkada Kabupaten Pati tahun 2012 diulang dua kali karena Sunarwi yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Pati, tidak mengindahkan rekomendasi dari DPP PDIP dengan mendaftarkan dirinya sebagai calon Bupati Kabupaten Pati tahun 2012 yang diusung oleh PDIP. Hal ini berdampak dengan Sunarwi diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Pati, serta dikeluarkan dari PDIP. Tindakan Sunarwi ini telah menentang keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan untuk mengusung Imam Suroso sebagai calon Bupati yang diusung oleh PDIP.

Hal ini sesuai dengan asumsi dari teori hukum besi oligarkhi Robert Michels, yang menyebutkan adanya kecenderungan dominasi oleh sekelompok kecil orang. Menurut Michels, oligarkhi muncul dalam empat dimensi politik, yaitu dari segi organisasi, oligarkhi dalam kepemimpinan, oligarkhi dalam

SKRIPSI

Achmad Ronggo Prihatmono

**PILKADA CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017: SUATU TINJAUAN
OLIGARKISME PARPOL**

konteks hubungan organisasi dengan rakyat dan oligarkhi dalam kekuasaan pemerintahan.⁸

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika politik kepartaian di Pati sehingga menghasilkan calon tunggal pada Pilkada tahun 2017?

⁸ Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2003), hlm. 202.

2. Faktor-faktor politik apa yang mendorong terjadinya blok pendukung calon tunggal dan bukan pendukung calon tunggal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana terjadinya calon tunggal pada pilkada Pati tahun 2017.
2. Mengetahui bagaimana proses terjadinya pasangan calon tunggal di pandang dari kepentingan partai politik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi sumber informasi mengenai bagaimana terjadinya calon tunggal pada pilkada Pati tahun 2017 serta menjadi sumber informasi mengenai bagaimana proses terjadinya calon tunggal di pandang dari kepentingan partai politik. Serta melalui adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam kajian studi ilmu politik.

2. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Pati dalam menjalankan pemerintahannya tentang apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari rakyat agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pemerintahan sebagai amanah sebagai kepala daerah dengan baik.

3. Masyarakat

Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai politik secara umum dan mengenai pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati tahun 2017 khususnya yang memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai politik dan dapat menjadi pemilih yang rasional kedepannya. Dengan demikian akan dapat meningkatkan

SKRIPSI

Achmad Ronggo Prihatmono

ketertarikan masyarakat terhadap politik dan persaingan dalam politik di Kabupaten Pati menjadi lebih kompetitif sehingga akan melahirkan banyak calon kepala daerah yang kompeten dan berkualitas serta mampu untuk mengemban amanah dari masyarakat sebagai kepala daerah.

1.5 Teori Oligarkhi Politik

Oligarki dan Partai Politik

Teori Oligarkhi relevan dalam penelitian fenomena calon tunggal pada pilkada Pati tahun 2017, karena cenderung dimonopoli oleh elit oligarkhi dalam menentukan calon yang akan diusung dan loby politik dalam pembentukan koalisi. Pembentukan koalisi dari partai politik untuk mengusung calon tertentu, loby politik dan transaksi politik dalam pilkada sampai pada elit partai di tingkat pusat. Tujuan yang hendak dicapai melalui koalisi partai politik, loby politik dan transaksi politik yaitu, sebagai upaya agar tetap berada dalam lingkaran kekuasaan, serta mendapatkan keuntungan finansial dari kemenangan calon yang diusung oleh partai politik.

Asal-usul teori oligarki pada awalnya berasal dari teori elit dan kekuasaan dalam ilmu politik. Kata elit berasal dari bahasa latin yaitu *eligere* yang memiliki arti memilih yang dalam pengertian yang lebih luas yaitu sekelompok orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam suatu masyarakat.⁹ Kelompok Elit yaitu kelompok yang mempunyai kekuasaan dan dapat mengendalikan orang banyak jumlahnya sedikit. Teori elit ini kemudian dicetuskan oleh Pareto bahwa elit berada pada lapisan atas masyarakat dan terbagi menjadi dua bagian yaitu: elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Sedangkan masyarakat berada pada lapisan bawah dan berjumlah banyak atau disebut juga dengan non elit.¹⁰

Kemudian Mosca juga menyatakan didalam masyarakat akan selalu terbentuk kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Pada kelas yang memerintah hanya ada sebagian kecil orang saja yang mana mereka menguasai semua fungsi politik, memiliki kekuasaan dan mereka mampu

⁹Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 1995), hlm. 3.

¹⁰M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 29.

mencapai tujuan dan mendapatkan keuntungan. Sementara kelas yang di perintah berjumlah besar dan berada dalam aturan dan kontrol dari kelas yang memerintah.¹¹

Semakin berkembangnya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan, kekurangan dari teori yang dikemukakan oleh Pareto dan Mosca mulai terlihat. Teori elit yang dikemukakan oleh Pareto dan Mosca tidak memperhatikan interaksi yang terjadi dalam masyarakat, sebab hanya melihat dominasi yang besar yang dimiliki oleh negara terhadap rakyat.

Teori elit ini kemudian disempurnakan oleh Robert Michels dengan teori yang ia kemukakan yaitu teori tentang hukum besi oligarki.¹² Hukum besi oligarki yang dikemukakan oleh Robert Michels menyebutkan adanya dominasi dari segolongan kecil orang terhadap orang banyak. Michels juga menyebutkan bahwa oligarki terjadi dalam empat dimensi politik, empat dimensi politik itu meliputi organisasi, kepemimpinan, hubungan keorganisasian dengan masyarakat, juga dalam kekuasaan pemerintahan.¹³ Michels mengemukakan konsep elit, sebab ia melihat pada elit yang berada dalam birokrasi dari partai politik dan dapat memperkuat pengertian dari elit, dimana jumlah elit hanya sedikit akan tetapi memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan orang banyak.

Teori elit juga di kemukakan oleh beberapa tokoh pemikir lain diantaranya yaitu, Schumpeter yang merupakan seorang ekonom, Lasswell yang merupakan seorang ilmuwan politik, dan Mills yang merupakan seorang sosiolog. Dari teori tentang elit mereka, Lasswell belum jelas dalam memberikan definisi elit, apakah hanya elit politik saja atau semua elit. Sementara itu teori dari Schumpeter dan

¹¹Ibid., hlm. 29.

¹²Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 203.

¹³Ibid., hlm. 205.

Mills hanya pandangan tentang posisi kelembagaan dan tidak memperhatikan adanya kekuasaan lain di balik posisi-posisi kelembagaan tersebut. Akan tetapi, dari pemikiran teori mereka, terdapat penjelasan mengenai kecenderungan yang dimiliki oleh golongan elit yaitu distribusi kekuasaan di masyarakat tidak tersebar dengan rata, melainkan hanya dipegang oleh orang atau sekelompok orang yaitu elit, selanjutnya kalangan internal elit memiliki sifat yang sama, menyatu dan mempunyai kesadaran sebagai elit dan mengatur keberlangsungan kelompok mereka sebagai elit, sehingga kelompok elit merupakan kelompok yang otonom.¹⁴

Lebih jauh saya akan berfokus tentang teori hukum besi oligarki dari Robert Michels dan kaitannya dalam partai politik. Dimulai pada tahun 1911 Robert Michels dalam bukunya yang berjudul *Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie: Untersuchungen Über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens* membuat teori hukum besi oligarki.¹⁵ Dalam bukunya tersebut Robert Michels mengatakan bahwa semua partai politik mempunyai kekuasaan yang sifatnya oligarkis yang berlandaskan dengan demokrasi. Sifat oligarkis dalam partai politik disebabkan oleh kebutuhan akan kepemimpinan dalam partai politik.¹⁶ Penjelasan lanjut dari fenomena oligarki dalam partai politik bersifat psikologis. Bersifat psikologis sebab oligarki berawal dari perubahan psikis dari perjalanan hidup yang telah dilewati oleh pemimpin-pemimpin partai yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga kekuatan politik dipegang oleh sekelompok kecil masyarakat atau disebut elit. Dalam hukum besi oligarki, terdapat prinsip-prinsip hukum besi oligarki, prinsip-prinsip tersebut yaitu partai merupakan bagian dari mekanisme, sehingga partai tidak dapat diidentifikasi dari anggota partai maupun kelas dari anggota pemilik partai. Tujuan

¹⁴ Mohtar Mas'oeed dan Colin MacAndrew, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 79.

¹⁵ Seymour Martin Lipset dan Arbi Sanit, *Robert Michels Partai Politik Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984).

¹⁶ https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Robert_Michels diakses pada 31/01/2019 pukul 09.41.

pembentukan partai adalah untuk menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa partai terpisah dari kelas yang diwakili oleh partai.

Oligarki memiliki beberapa asumsi, diantaranya yaitu pertama, oligarki bukan hanya sekelompok kecil elit yang menguasai dan dapat mengendalikan sumber daya material yang ada dalam upaya mempertahankan posisi, menambah kekayaan yang dimiliki ataupun posisi dalam lingkungan sosialnya di kalangan elit.

Kedua, penyebab kemunculan oligarki pada partai-partai yang memiliki ideologi demokratis adalah karena partai tersebut memiliki kebutuhan teknis atas kepemimpinan. Partai politik membutuhkan kepemimpinan mulai dari proses diferensiasi fungsi-fungsi dalam partai yang sangat kompleks sehingga para pemimpin partai memisahkan dirinya dari massa dalam partai politik tersebut.

Ketiga, teori hukum besi oligarki, memiliki hukum sosiologis dari partai politik, isinya yaitu organisasi melahirkan dominasi dari golongan terpilih atas pemilih, pemegang mandat atas pemberi mandat, serta utusan atas yang mengutus. Barang siapa yang berbicara tentang organisasi, berarti juga berbicara mengenai oligarki.¹⁷

Keempat, kekuatan oligarkis merupakan acuan bagi setiap organisasi atau partai politik berdasarkan dengan basis demokratis. Struktur oligarkis merusak prinsip dasar demokratis melalui kekuasaan yang tidak terbatas dari para

¹⁷https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Robert_Michels diakses pada 01/02/2019 pukul 09.54

pemimpin terhadap massa yang telah memilih mereka, menjadikan struktur oligarkis membunuh pada demokrasi.¹⁸

Awal dari Robert Michels menemukan teori oligarki yang terdapat pada elit berawal dari yang terjadi pada Partai Sosial Demokrat di Jerman. Menurut Michels, Partai Sosial Demokrat merupakan partai yang berbasis kader sehingga adanya oligarki dalam partai tersebut merupakan kontradiksi. Dalam partai politik yang memiliki basis kader, kader semestinya diberikan ruang untuk menentukan arah jalannya partai politik, dalam hal ini kader partai harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan partai politik. Dari hal ini Robert Michels mengambil pelajaran mengenai sistem kepartaian di Jerman dan melalui pemikirannya yaitu hukum besi oligarki, ia menyebutkan bahwa oligarki yang ada dalam organisasi maupun partai politik merupakan sarana untuk menguasai anggaran negara.

Partai politik mempunyai kekuatan oligarkis, kekuatan oligarkis tersebut akan terjadi juga dalam pemerintahan, hal ini tidak memerdulikan bagaimana partai politik mendapatkan kekuasaan, baik melalui pemilihan umum yang demokratis atau dengan cara penggulingan kekuasaan atau revolusi. Perbedaan antara oligarki dengan demokrasi ialah pada kepentingan yang ingin dicapai, dalam oligarki kepentingan yang ingin dicapai adalah kepentingan dari kelompok para pemegang kekuasaan, sementara dalam demokrasi, kepentingan yang ingin dicapai ialah kepentingan dari orang banyak, meskipun bukan konstituen yang dia wakili atau yang memilih dia sebagai wakil.

Dalam pemerintahan yang demokratis, walaupun kekuasaan dipegang oleh sedikit orang, namun tujuan yang ingin dicapai adalah kepentingan bersama. Hal inilah yang membedakan dengan oligarki, yang bertujuan untuk mendapatkan kepentingan sekelompok kecil orang yang berkuasa. Yang menjadi hal positif

¹⁸Pradjarta Dirdjosanjoto, *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 23.

yang diperoleh dengan hidupnya demokrasi adalah fungsi partai politik sebagai tempat untuk menghimpun aspirasi dari rakyat, yang ditujukan kepada pemerintah menjadi tercapai.¹⁹ Alasan yang kuat supaya partai politik berjalan sesuai fungsinya ialah asal mula terbentuknya partai politik disebabkan, karena demokrasi menuntut kekuatan rakyat dapat menentukan kebijakan yang akan dibuat oleh negara secara langsung, agar sesuai dengan pilihan dari rakyat melalui perantara partai politik. Melalui ungkapan ini berarti rakyat merupakan golongan mayoritas orang yang menginginkan dipimpin oleh sekelompok kecil orang melalui sistem demokrasi.

Faktor yang menyebabkan hidupnya oligarki yaitu sebuah organisasi ataupun partai politik memiliki kebutuhan taktis maupun kebutuhan teknis yang harus dipenuhi oleh organisasi atau partai. Kebutuhan-kebutuhan ini mengharuskan partai politik dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga partai politik terperangkap dalam hukum besi oligarki. Selanjutnya adalah, apabila partai politik sudah terperangkap kedalam hukum besi oligarki maka, partai politik tidak lagi mematuhi terhadap konstituennya, tetapi partai politik akan patuh terhadap elit yang menguasai partai politik sehingga, partai politik menjadi alat bagi golongan oligarkis partai dalam mempertahankan kekuasaan dan mencapai kepentingannya dan tidak lagi memperhatikan aspirasi rakyat.

Berkaitan dengan konsep oligarkinya, Michels menyebutkan bahwa tumbuhnya oligarki didukung oleh sifat dari sebagian besar manusia yang cenderung apatis, pemalas, mau untuk diperbudak, dan tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Sementara sistem-sistem politik semakin menuju ke arah

¹⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 163.

sentralisasi dan juga oligarki. Situasi ini merupakan peluang bagi para pemimpin untuk mempertahankan kekuasaan mereka.²⁰

Struktur antara elit dengan rakyat dapat digambarkan dengan piramida, dimana rakyat berada dalam lapisan bawah piramida dengan jumlah yang besar, sementara itu elit berada dalam lapisan yang paling atas dengan jumlah yang sedikit, namun mereka merupakan sekelompok orang yang memiliki sumberdaya yang banyak dan juga memiliki kekuasaan untuk memerintah pada rakyat. Hal ini juga meliputi terhadap demokrasi representatif yang mana meskipun rakyat atau warga negara memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan akan tetapi, sifat representatif ini menjadikan warga negara menjadi mayoritas orang yang tersingkirkan oleh sistem politik tersebut. Hal ini menjadi benar-benar terwujud jika wakil yang terpilih tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan amanah, melainkan hanya ingin mencapai ambisi politik untuk mendapatkan kekuasaan dan menjadi golongan elit.

Jika merujuk pada teori hukum besi oligarki dari Robert Michels yang menyatakan bahwa organisasi melahirkan dominasi oleh golongan terpilih atas pemilih, oleh pemegang mandat atas pemberi mandat, oleh utusan atas yang mengutus, barang siapa yang berbicara tentang organisasi ia juga berbicara tentang oligarki. Melihat pada fenomena oligarki saat ini, maka dapat dijumpai tidak hanya pada partai politik saja namun dalam skala yang lebih luas, oligarki dapat dijumpai dalam pemerintahan, militer, partai politik dan juga birokrasi yang mana kesemuanya memiliki struktur yang hierarkis atau terdapat elit yang memiliki kekuasaan yang mendominasi didalamnya.

Robert Michels merupakan seorang tokoh yang menulis tentang oligarki dan juga dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di parpol yaitu dalam bukunya yang berjudul *Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie*:

²⁰Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 206.

Untersuchungen Uber die Oligarsischen Tendenzen des Gruppenleben. Di dalam buku itu juga Rober Michels membuat sebuah teori yaitu teori hukum besi oligarki yang isi dari teori tersebut ialah bahwa semua partai politik mempunyai kekuasaan yang bersifat oligarkis yang berlandaskan dengan demokrasi. Partai politik bersifat oligarkis karena partai politik membutuhkan adanya kepemimpinan dalam partai politik tersebut sehingga partai politik tersebut dikuasai oleh sekelompok kecil elit dalam partai politik.

Selain menggunakan teori hukum besi oligarki dari Robert Michels, dalam mengamati fenomena calon tunggal, juga memerlukan tambahan dari sudut pandang loby politik dan politik transaksional yang dilakukan oleh elit partai. Seperti dalam fenomena calon tunggal pilkada Kabupaten Pati tahun 2017, sebanyak tujuh dari delapan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengerucut mengusung satu calon. Terbentuknya koalisi gemuk partai politik pengusung calon tunggal Haryanto-Saiful, tidak terlepas dari loby politik dan politik transaksional yang dilakukan oleh elit partai. Dengan bergabung dalam koalisi untuk memenangkan calon tunggal, merupakan upaya dari elit partai untuk tetap berada dalam lingkaran kekuasaan sekaligus mendapatkan keuntungan finansial dari kekuatan modal Haryanto. Kekuatan finansial yang dimiliki oleh Haryanto merupakan faktor penting bagi partai politik mau menjadi kendaraan politik bagi Haryanto.

Kondisi politik di Kabupaten Pati pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2017, dimana hanya terdapat pasangan Haryanto-Saiful sebagai calon tunggal melawan kotak kosong. Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 diikuti oleh kepentingan oligarkhi partai, dengan bergabungnya tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati, bersama-sama mengerucut mengusung satu calon. Haryanto merupakan petahana dan merupakan putra daerah Pati, sehingga sebagian masyarakat Pati tetap memilih Haryanto. Sosok Haryanto menuai pro dan kontra karena Haryanto dianggap lebih pro terhadap investor

daripada rakyat. Permasalahan yang paling besar adalah Haryanto memberikan izin beroperasinya pabrik semen di bukit Kendeng. Hal ini membuat Haryanto tidak disukai oleh sebagian masyarakat Pati, terutama Pati bagian Selatan yang terkena dampak dari beroperasinya pabrik semen. Bentuk dari perlawanan masyarakat Pati terhadap pasangan calon tunggal adalah dengan munculnya dua gerakan yaitu, Geram Pati dan AKDPP yang berupaya untuk memenangkan kotak kosong. Jika melihat lebih jauh, perlawanan dari gerakan masyarakat Pati yang berupaya memenangkan kotak kosong, juga tidak lepas dari kepentingan politik. Sosok Budiono yang merupakan mantan wakil dari Haryanto pada periode pertama berada dibalik dua gerakan tersebut yaitu Geram Pati dan AKDPP. Budiono berupaya memenangkan kotak kosong menggunakan kasus pabrik semen untuk mengalahkan Haryanto, kemudian membuka jalan bagi dirinya untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Pati tahun 2017.

SKRIPSI

Achmad Ronggo Prihatmono

**PILKADA CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017: SUATU TINJAUAN
OLIGARKISME PARPOL**

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Oligarki

Oligarki merupakan sebuah struktur bentuk pemerintahan yang mana kekuasaan berada pada sekelompok kecil orang. Sekelompok kecil orang tersebut memiliki kekuasaan dan sumberdaya material melebihi orang banyak pada sebuah organisasi. Oligarki dapat mengendalikan kekuasaan untuk mencapai kepentingan mereka tanpa memerhatikan kepentingan banyak orang. Lebih lagi, oligarki memiliki sifat elitis dan eksklusif yang hanya beranggotakan orang-orang yang memiliki sumberdaya modal untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan serta, menjaga status sosial mereka agar tetap berada di lingkaran kekuasaan.

1.6.2 Calon Tunggal

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum dapat disebabkan karena berapa faktor penyebab diantaranya yaitu elektabilitas salah satu calon terlalu tinggi sehingga sulit untuk dikalahkan, menyebabkan banyak mundurnya calon lawan dan bergabungnya banyak partai politik untuk mendapatkan keuntungan dari kemenangan calon tersebut, mahalnya biaya yang dibutuhkan dalam mengikuti proses pencalonan, mulai dari mahalnya biaya yang diminta oleh partai pengusung, tidak berfungsinya pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik sehingga partai politik tidak mempunyai kader yang kuat untuk diusung dalam pemilihan umum, naiknya persyaratan dukungan yang diatur dalam undang-undang No. 10 Tahun 2016 yaitu dari jalur partai politik minimal diusung oleh 20% kursi di DPRD atau 25% dari jumlah suara sah di daerah tersebut.

1.6.3 Demokrasi

Demokrasi secara sederhana yaitu pemerintahan yang berada ditangan rakyat seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Abraham Lincoln yang mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh

rakyat dan untuk rakyat. Menurut definisi ini berarti rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi. Dengan kedaulatan yang berada ditangan rakyat, dalam hal ini rakyat dituntut untuk aktif dalam keikutsertaan dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan karena yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat.

Sementara itu, dalam praktek menjalankan partisipasi politik oleh masyarakat memerlukan kesadaran politik dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih mengerti dan memahami tentang politik, sehingga masyarakat dapat bersikap rasional dalam menjalankan kedaulatan dan mampu untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai kedepannya dalam kehidupan bernegara.

1.6.4 Partisipasi Politik

Adanya partisipasi politik didahului oleh pembuatan keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah yang kemudian dilaksanakan sebagai keputusan politik yang memengaruhi terhadap kehidupan rakyat banyak maka, rakyat memiliki hak untuk ikut menentukan keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan. Dalam pengertian yang lebih luas partisipasi politik juga termasuk rakyat dapat memilih sendiri calon pemimpinnya dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, maupun kegiatan-kegiatan partisipasi politik yang lainnya seperti hadir dalam rapat umum, bergabung menjadi anggota partai politik maupun kelompok kepentingan, serta menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah maupun parlemen.

1.6.5 Partai Politik

Awal mula partai politik lahir di wilayah negara-negara Eropa Barat, yang menjadi penyebab dari lahirnya partai politik adalah adanya gagasan yang menyatakan bahwa rakyat perlu untuk ikutserta dalam proses politik. Oleh sebab itu, partai politik lahir sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Jadi, partai politik merupakan sebuah organisasi politik yang berperan sebagai wadah

SKRIPSI

Achmad Ronggo Prihatmono

**PILKADA CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017: SUATU TINJAUAN
OLIGARKISME PARPOL**

dalam menampung aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah, melalui program-program yang ditawarkan oleh partai politik yang sesuai dengan visi dan misi dari partai politik. Adanya banyak partai politik dalam suatu negara dapat menjadi simbol terhadap adanya suasana yang demokratis dalam sebuah Negara, bahwa dalam negara tersebut terdapat persaingan atau terdapat partai yang menjadi oposisi dari pemerintah sebagai pressure group yang dapat memengaruhi terhadap proses pembuatan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Penjelasan lebih lanjut tentang partai politik terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1 bahwa partai politik sebagai organisasi berskala nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas kesamaan keinginan dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta menjaga keutuhan dan persatuan NKRI.

1.6.6 Kontestasi

Melalui perubahan terhadap mekanisme pemilu seperti halnya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara dalam partisipasi mereka terhadap politik. Kesempatan untuk berpartisipasi bagi seluruh warga negara tidak hanya terbatas pada kesempatan untuk memberikan hak suara mereka saja, akan tetapi juga ikut serta dalam mencalonkan diri sebagai salah seorang kontestan dalam pilkada. Pemenangan dari kontestasi politik ini ditentukan berdasarkan pada suara terbanyak yang diberikan oleh pemilih. Dalam sistem demokrasi, yang menjadi acuan utama adalah sejauh mana kontestan bisa mendapatkan hati rakyat melalui program kerja seperti dalam kampanye yang menentukan siapa yang menjadi pemenang adalah masyarakat sendiri melalui pilkada langsung.

Jika dilihat di Indonesia yang saat ini menerapkan sistem demokrasi yang multipartai, berarti persaingan politik yang ketat tidak dapat untuk dihindarkan. Dalam sistem multipartai persaingan politik yang terjadi akan berjalan dengan dinamis, karena setiap lawan politik memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan kekuasaan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana realita yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 mengenai mengapa hanya ada calon tunggal yang maju mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 ditinjau dari perspektif teori hukum besi oligarki Robert Michels.

1.8.2 Tipe Penelitian

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Melalui metode penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti dapat mendapatkan data, mengumpulkan data, mengolah data serta menganalisis hasil yang didapatkan dari data tersebut melalui wawancara yang mendalam dengan subyek yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi peneelitian berada di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah sebab di Kabupaten Pati terdapat fenomena calon tunggal yang menarik dengan terjadinya perlawanan antar kubu yaitu pendukung Haryanto dengan pendukung kotak

SKRIPSI

Achmad Ronggo Prihatmono

**PILKADA CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017: SUATU TINJAUAN
OLIGARKISME PARPOL**

kosong yang tidak menginginkan Kabupaten Pati dipimpin kembali oleh Haryanto.

1.8.4 Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah Elit dari partai Nasdem, sebagai partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati, namun tidak ikut koalisi partai politik yang mengusung pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful, serta keterkaitan elit partai politik di Kabupaten Pati dengan perlawanan dari masyarakat Pati yang menginginkan adanya calon yang lain. Informan yang saya pilih diantaranya yaitu:

- Muhammadun, Selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Pati. Saya memilih bapak Muhammadun sebagai informan, karena selaku ketua DPC PKB Kabupaten Pati mengetahui bagaimana kekuatan politik Haryanto-Budiono pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2012. Haryanto berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat NU, dengan menggandeng Budiono sebagai wakil dan terpilih menjadi Bupati Kabupaten Pati tahun 2012-2017. Saya bertemu dengan bapak Muhammadun di kantor DPC PKB Kabupaten Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.
- Yusuf Hasyim, selaku Ketua PCNU Kabupaten Pati. Saya memilih bapak Yusuf Hasyim sebagai informan, karena mengetahui kondisi dalam internal organisasi NU, bagaimana mengajak masyarakat NU memberikan dukungannya kepada pasangan calon Haryanto-Budiono untuk memenangkan pilkada Kabupaten Pati Tahun 2012. Saya bertemu dengan bapak Yusuf Hasyim di kediamannya di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.
- Ali Badrudin, selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Pati. Saya memilih bapak Ali Badrudin sebagai informan, karena mengetahui

kondisi internal PDIP Kabupaten Pati yang sempat mengalami konflik internal, terhadap Sunarwi yang melakukan tindakan makar, dengan tidak mengikuti keputusan rekomendasi dari DPP PDIP. Saya bertemu dengan bapak Ali Badrudin di kantor DPC PDIP Kabupaten Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

- Ali Mustofa, warga Kecamatan Batangan penerima santunan. Saya memilih bapak Ali Mustofa sebagai informan, karena bapak Ali Mustofa menerima langsung program santunan kematian sebesar 1 juta rupiah, yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pati pada masa pemerintahan Haryanto. Saya bertemu dengan bapak Ali Mustofa di kediamannya di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati.
- Bambang, warga Kecamatan Kayen. Saya memilih bapak Bambang sebagai informan, karena bapak Bambang sebagai warga yang terkena dampak langsung dari beroperasinya pabrik semen. Saya bertemu dengan bapak Bambang di kediamannya di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.
- Susilo, Ketua DPC Nasdem Kabupaten Pati. Saya memilih bapak Susilo sebagai informan, karena mengetahui kondisi internal partai Nasdem. Partai Nasdem merupakan satu-satunya partai yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pati yang tidak ikut mengusung pasangan calon tunggal. Saya bertemu dengan bapak Susilo di tempat usahanya di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.
- Supriyanto, selaku Divisi Hukum KPU Pati. Saya memilih bapak Supriyanto sebagai informan, karena menangani langsung kasus gugatan yang dilakukan oleh AKDPP terhadap hasil pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Saya bertemu dengan bapak Supriyanto di kantor KPU Kabupaten Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.

SKRIPSI

Achmad Ronggo Prihatmono

**PILKADA CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017: SUATU TINJAUAN
OLIGARKISME PARPOL**

- Sutiyo, selaku Ketua AKDPP. Saya memilih bapak Sutiyo sebagai informan, karena sebagai ketua sekaligus penggerak AKDPP untuk memenangkan kotak kosong. Saya bertemu dengan bapak Sutiyo di kediamannya di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer: melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara terhadap subjek penelitian, melakukan kegiatan observasi serta kegiatan dokumentasi. Dalam mencari informan yang tepat untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini, saya menggunakan metode purposive sampling, saya memilih informan yang mengerti benar tentang situasi yang terjadi, juga menggunakan informan dari kedua pihak, yaitu pihak yang pro dengan Haryanto dan dari relawan kotak kosong. Untuk memudahkan supaya informan mau memberikan informasi, saya mengajak kerabat saya yang merupakan warga Pati, untuk berbincang-bincang dengan calon informan dan membuka jalan agar informan mau memberikan informasi sebagai data primer. Meskipun demikian, dalam wawancara dengan informan, ada yang tidak mau informan sebutkan, padahal informan sebetulnya mengetahui dan tidak mau memberikan informasi lebih jauh.

b. Data Sekunder: melakukan penelitian dengan berdasarkan perkembangan informasi yang didapatkan dari media cetak maupun media elektronik untuk memperkuat informasi penelitian. Saya mencari data sekunder lewat media online dari surat kabar lokal, nasional dan website resmi pemerintah daerah Jawa Tengah dan website resmi KPU Kabupaten Pati. Diantaranya yaitu:

- nasional.kompas.com
- jateng.tribunnews.com
- kesbangpol.jatengprov.go.id
- kpu-patikab.go.id

1.8.6 Lamanya Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari tanggal 10 Februari 2019 sampai 20 April 2019.

SKRIPSI

Achmad Ronggo Prihatmono

**PILKADA CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017: SUATU TINJAUAN
OLIGARKISME PARPOL**